

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kawasan perbatasan sangat penting karena dapat menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara tetangga; Membangun masyarakat perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), keamanan (*security*), dan lingkungan (*environment*) secara serasi; Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas kebutuhan; Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi; Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga. Semenjak Timor Leste resmi berdiri sendiri sebagai suatu negara baru dan dikenal dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara otomatis menjadi provinsi perbatasan. Situasi tersebut menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi strategis karena merupakan garda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan dan sebagai barometer potret pembangunan nasional. Karena itu fokus pemerintah akan penataan dan pengembangan kualitas pembangunan daerah dalam rangka percepatan pembangunan terus dijalankan dengan memaksimalkan potensi sumber daya.

Pembangunan kawasan perbatasan menurut Luthfi menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan dapat dimulai dengan mengenali terlebih dahulu potensi dan masalah yang dilihat dari karakteristik secara tipologi kawasan

perbatasan.¹ Sedangkan pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya². Potensi yang dimiliki di Desa Nilulat adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat menjadi untuk menata suatu daerah. Berhadapan dengan situasi yang sudah ada ini, Desa Nilulat memiliki dua sektor besar sebagai suatu potensi dasar yaitu sektor pertanian dan sektor peternakan. Untuk itu dalam upaya membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan adalah membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah dalam dua persoalan yaitu soal motivasi dan dana untuk mengelola potensi alam yang sudah ada sebagai kekuatan dasar untuk setiap wilayah perbatasan di daerah-daerah terpencil.

Pada tahun 2016 Desa Nilulat hanya mendapat bantuan dana untuk membangun satu unit gedung Aula pertemuan kemudian untuk pembangunan infrastruktur seperti Jalan raya sedang dalam tahap perencanaan. Pada kenyataannya, saat ini masyarakat di Desa Nilulat masih belum dapat menikmati hasil pembangunan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat terperangkap dalam kemiskinan yang disebabkan adanya keterbatasan dalam mengakses sumber daya alam, sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pembangunan secara menyeluruh belum seoptimalnya pembangunan-pembangunan di setiap kawasan daerah perbatasan dibawah wilayah Negara Republik Indonesia. Artinya penggunaan dana dalam sistem pembangunan

¹ Muta'ali Luthfi (2014). *Pengembangan Kawasan Perbatasan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi. UGM: Yogyakarta.

² Widjaja, HAW (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

belum merata untuk dirasakan oleh masyarakat-masyarakat disekitar desa-desa perbatasan termasuk desa Nilulat di kawasan perbatasan.

Sampai saat ini, kawasan perbatasan identik dengan daerah terisolir, terpencil, dan sulitnya konektivitas dan aksesibilitas terhadap wilayah lain. Hal ini menimbulkan peluang kegiatan illegal, contohnya: Seperti perdagangan BBM dan Sembako, dimana barang-barang dari Indonesia yang lebih banyak di jual ke Timor Leste. Misalnya untuk sembako, satu barang kebutuhan pokok yang berharga Rp 1.000 di Indonesia sedangkan mereka menjual kembali menjadi Rp 4.000 di Timor Leste. Sistem perdagangan illegal ini dengan menyeberang hingga sejauh 1-2 km melalui jalan tikus atau jalan tanpa surat izin. Hal ini agak sulit diberantas karena keadaan topografi perbatasan yang berbukit-bukit³. Sehingga sejauh ini masih terdapat kawasan perbatasan yang jauh dari kata sejahtera untuk masyarakatnya. Apabila hal ini dibiarkan terus berlarut, maka akan berpotensi sebagai ancaman bagi kesejahteraan, kedaulatan dan keutuhan masyarakat di sekitar daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji strategi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tentram dan damai .

Pemerintah Jokowi memiliki agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita. Salah satu agendanya adalah terfokus pada perbatasan, untuk membangun daerah-daerah pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan⁴. Dengan demikian, untuk memperkuat kawasan perbatasan diperlukan suatu strategi yang tepat agar pemerintah dapat membangun kawasan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan untuk meningkat dan dapat terbebas dari belenggu kemiskinan.

³ Wawancara dengan Aparat Desa Nilulat, Datus Amlupu, tanggal 10 januari 2019 di Nilulat

⁴ RPJMN Tahun 2015-2019 (Perpres No.2/2015)

Kemiskinan menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat terhadap akses sumber daya. Dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, maka dalam tulisan ini penulis berusaha untuk mengkaji sedikit lebih jauh, mengapa pembangunan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pemberdayaan merupakan strategi yang dianggap tepat dalam konteks pembangunan. Dengan menerapkan konsep ini di kawasan perbatasan diharapkan dapat mendukung terwujudnya perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) yang berdaya saing, berdaulat dan aman.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan RI-RDTL.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan RI-RDTL.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Pribadi : Penelitian ini diharapkan menjadi tempat bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat dan memperkaya wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan peneliti
2. Mahasiswa Fakultas : Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi bagi para mahasiswa
3. Masyarakat Perbatasan : Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan informasi dan menjadi salah satu wacana acuan dalam Pengembangan Kawasan di daerah Perbatasan.